



**PENGARUH DIGITALISASI PENGAWASAN PAJAK, PENERAPAN  
AKUNTANSI FORENSIK, DAN PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI  
DALAM PERUSAHAAN UNTUK MENDETEKSI ADANYA FRAUD  
TERHADAP PENCEGAHAN PENGGELAPAN PAJAK  
(PADA PT. ARMIDIAN KARYATAMA, TBK)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
CAHYA WIJAYA  
20210100115**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH DIGITALISASI PENGAWASAN PAJAK, PENERAPAN  
AKUNTANSI FORENSIK, DAN PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI  
DALAM PERUSAHAAN UNTUK MENDETEKSI ADANYA FRAUD  
TERHADAP PENCEGAHAN PENGGELAPAN PAJAK  
(PADA PT. ARMIDIAN KARYATAMA, TBK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :  
CAHYA WIJAYA  
20210100115**

**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Cahya Wijaya

NIM : 20210100115

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,

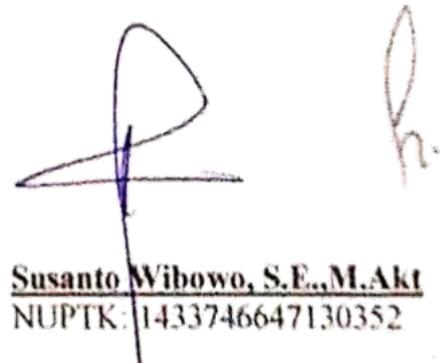


Sutandi, S.E., M.Akt  
NUPTK: 5956756657130122

Tangerang, 24 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt  
NUPTK: 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT. Armidian Karyatama, Tbk

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Cahya Wijaya

NIM : 20210100115

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akutansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 9 Januari 2025

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Sutandi, S.E., M.Akt**  
NUPTK: 5956756657130122



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NUPTK: 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E.,M.Ak

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Cahya Wijaya

NIM : 20210100115

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT. Armidian Karyatama, Tbk.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,

Pembimbing,



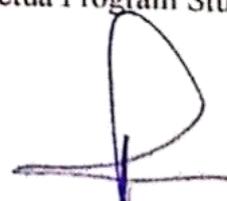
**Sutandi, S.E.,M.Akt**

NUPTK: 5956756657130122

Tangerang, 9 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E.M.Akt**

NUPTK: 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20210100115  
Nama : Cahya Wijaya  
Jenjang Studi : Strata 1 (SI)  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **"Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk"**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Tangerang, 12 Maret 2025

Penulis,



NIM: 20210100115

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Cahya Wijaya  
NIM : 20210100115  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT. Armidian Karyatama, Tbk.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"SANGAT MEMUASKAN"** oleh Tim Penguji pada hari Selasa, 25 Februari 2025.

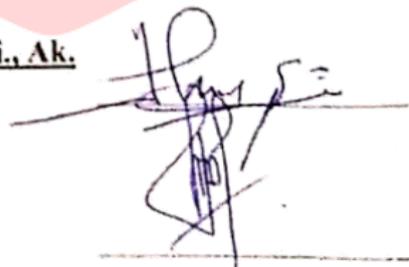
Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Etty Herijawati, S.E., M.M.  
NUPTK : 2748748649230102



Penguji I : Farid Addy Sumantri, S.E., M.M., M.Si., Ak.  
NUPTK : 8744744645137052



Penguji II : Lianah The, S.E., MCom., Ph.D.  
NUPTK : 1740749650230112

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.  
NUPTK : 9759751652230072

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 15 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



NIM: 20210100115

**PENGARUH DIGITALISASI PENGAWASAN PAJAK, PENERAPAN  
AKUNTANSI FORENSIK, DAN PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI  
DALAM PERUSAHAAN UNTUK MENDETEKSI ADANYA FRAUD  
TERHADAP PENCEGAHAN PENGGELAPAN PAJAK  
(PADA PT. ARMIDIAN KARYATAMA, TBK)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi dalam perusahaan untuk mendeteksi adanya fraud terhadap pencegahan penggelapan pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan sumber data primer dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang terdiri dari manajer pajak, staf keuangan, dan auditor internal.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara parsial digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penggelapan pajak. Selain itu, digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan penggelapan pajak.

**Kata Kunci : Digitalisasi pengawasan pajak, Penerapan Akuntansi forensik, Penggunaan system teknologi dalam perusahaan untuk mendeteksi fraud, Pencegahan penggelapan pajak.**

**THE EFFECT OF DIGITALIZATION OF TAX SUPERVISION,  
IMPLEMENTATION OF FORENSIC ACCOUNTING, AND  
THE USE OF TECHNOLOGY SYSTEMS IN THE COMPANY  
TO DETECT FRAUD ON THE PREVENTION OF TAX  
EVASION**

**(AT PT. ARMIDIAN KARYATAMA, TBK)**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of digitalization of tax supervision, the application of forensic accounting, and the use of technology systems within the company to detect fraud on the prevention of tax evasion at PT Armidian Karyatama, Tbk.*

*The research method used is quantitative and primary data sources with a survey approach through distributing questionnaires to 30 respondents consisting of tax managers, financial staff, and internal auditors.*

*This study found that partially the digitalization of tax supervision, the application of forensic accounting, and the use of technology systems have a significant effect on the prevention of tax evasion. In addition, the digitalization of tax supervision, the application of forensic accounting, and the use of technology systems simultaneously have a significant effect on the prevention of tax evasion.*

**Keywords:** *Digitalization of tax supervision, Implementation of forensic accounting, Use of technology systems in companies to detect fraud, Prevention of tax evasion.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kedua Orang tua saya atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Pengawasan Pajak, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Penggunaan Sistem Teknologi dalam Perusahaan untuk Mendeteksi Adanya Fraud Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak pada PT. Armidian Karyatama, Tbk.”** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E.,M.M.,BKP.,CTC selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, materi, nasehat, waktu serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Seluruh dosen pengajar Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama masa kuliah.
6. Seluruh teman-teman di Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah berbagi ilmu dan lain-lain selama tujuh (7) semester menempuh pendidikan di Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
7. Saudara-saudara dan semua teman-teman penulis serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Tangerang, 15 Januari 2025



Cahya Wijaya

NIM: 20210100115

## DAFTAR ISI

**JUDUL LUAR**

**JUDUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11

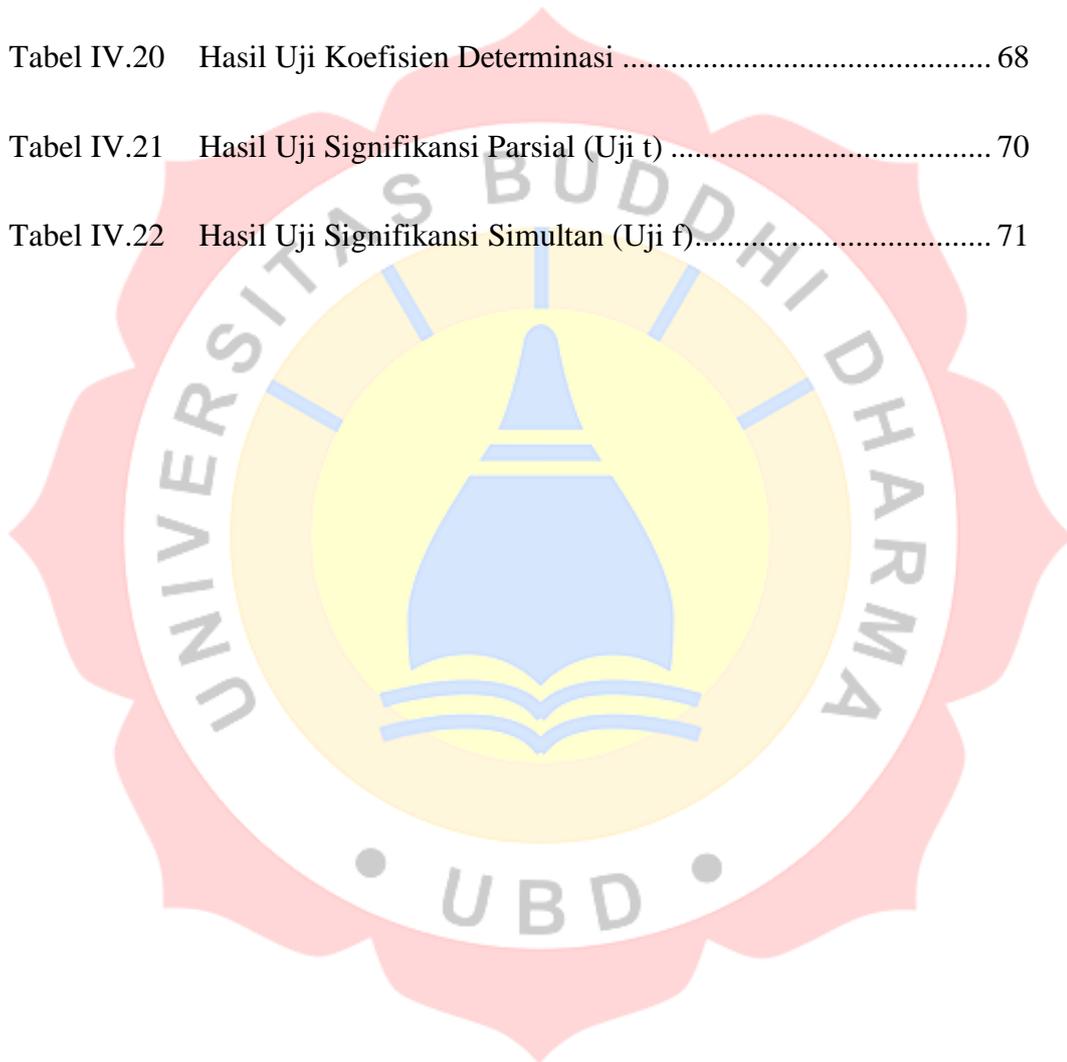
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	12
1. Teori Akuntansi.....	12
2. Pajak .....	14
3. Digitalisasi Pengawasan Pajak .....	17
4. Akuntansi Forensik .....	19
5. Penggunaan Sistem Teknologi.....	22
6. Pencegahan Penggelapan Pajak.....	26
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	34
D. Perumusan Hipotesis .....	35
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Objek Penelitian .....	37
C. Struktur Perusahaan.....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Populasi dan Sampel .....	39
1. Populasi .....	39
2. Sampel .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Definisi Operasional Variabel .....	41
H. Teknik Analisis Data .....	42
1. Uji Validitas dan Realibilitas .....	42
2. Uji Asumsi Klasik .....	43
3. Analisis Data Model Statistik.....	44
4. Uji Statistik .....	45
I. Uji Hipotesis.....	47
J. Alat Analisis .....	47

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	48
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	49
1. Uji Frekuensi Digitalisasi Pengawasan Pajak .....	51
2. Uji Frekuensi Penerapan Akuntansi Forensik .....	53
3. Uji Frekuensi Penggunaan Sistem Teknologi .....	56
4. Uji Frekuensi Pencegahan Penggelapan Pajak.....	58
C. Analisis Hasil Penelitian .....	58
1. Uji Validitas .....	59
2. Uji Realibilitas.....	63
D. Uji Asumsi Klasik .....	65
1. Uji Normalitas .....	66
2. Uji Multikolinearitas .....	66
E. Uji Koefisien Determinasi.....	67
F. Uji Hipotesis.....	68
1. Uji t (Parsial) .....	68
2. Uji f (Simultan).....	70
G. Pembahasan.....	72
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

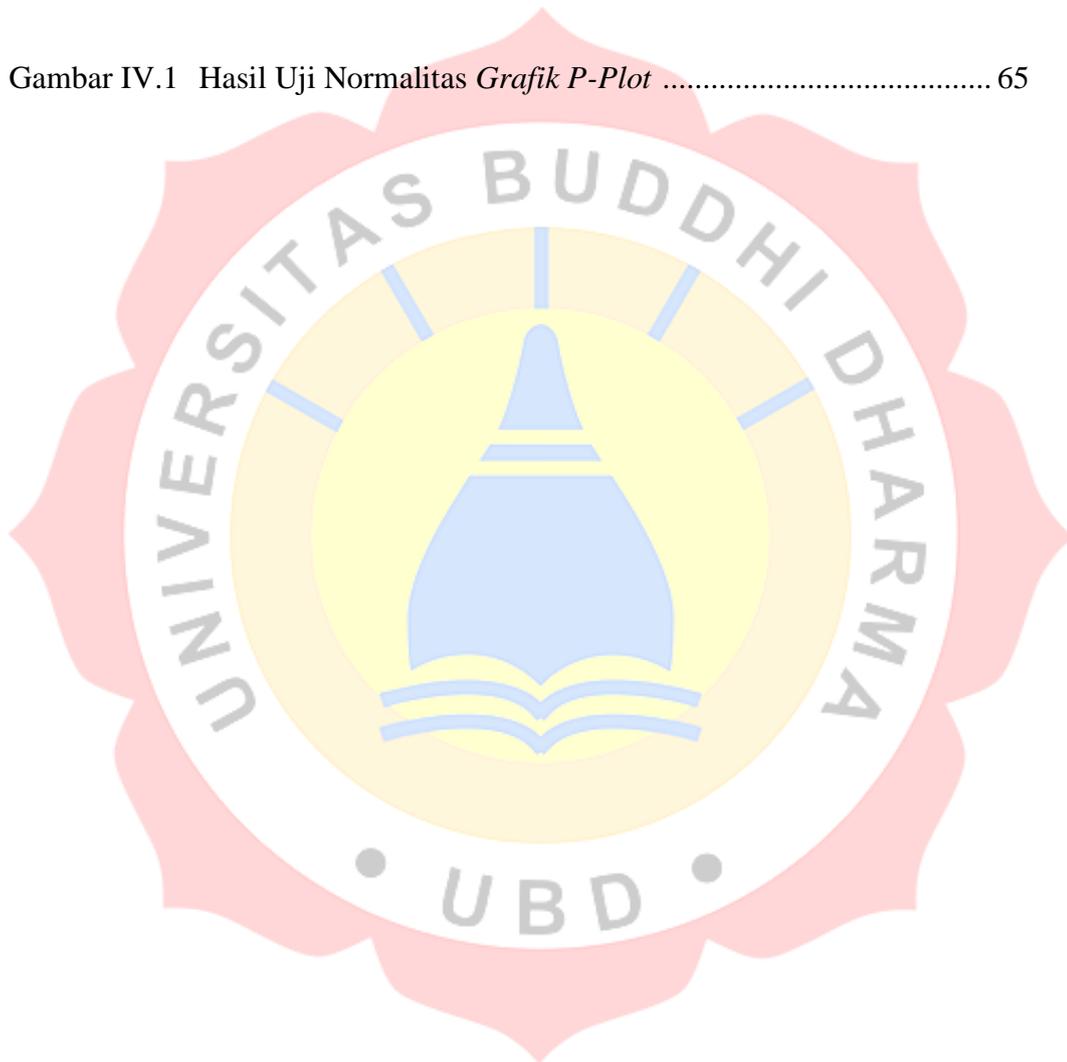
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel .....	41
Tabel IV.1	Karakteristik Responden .....	49
Tabel IV.2	Kuesioner (X1) .....	50
Tabel IV.3	Hasil Uji Frekuensi Variabel (X1) .....	51
Tabel IV.4	Kuesioner (X2) .....	52
Tabel IV.5	Hasil Uji Frekuensi Variabel (X2) .....	53
Tabel IV.6	Kuesioner (X3) .....	54
Tabel IV.7	Hasil Uji Frekuensi Variabel (X3) .....	55
Tabel IV.8	Kuesioner (Y) .....	56
Tabel IV.9	Hasil Uji Frekuensi Variabel (Y) .....	57
Tabel IV.10	Hasil Uji Validitas Variabel (X1) .....	59
Tabel IV.11	Hasil Uji Validitas Variabel (X2).....	60
Tabel IV.12	Hasil Uji Validitas Variabel (X3).....	61
Tabel IV.13	Hasil Uji Validitas Variabel (Y).....	62
Tabel IV.14	Hasil Uji Realibilitas Variabel (X1).....	63
Tabel IV.15	Hasil Uji Realibilitas Variabel (X2).....	63

Tabel IV.16	Hasil Uji Realibilitas Variabel (X3) .....	64
Tabel IV.17	Hasil Uji Realibilitas Variabel (Y) .....	64
Tabel IV.18	Hasil Uji Normalitas .....	66
Tabel IV.19	Hasil Uji Multikolinearitas .....	66
Tabel IV.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	68
Tabel IV.21	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	70
Tabel IV.22	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f) .....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar III.1	Struktur Perusahaan.....	38
Gambar IV.1	Hasil Uji Normalitas <i>Grafik P-Plot</i> .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

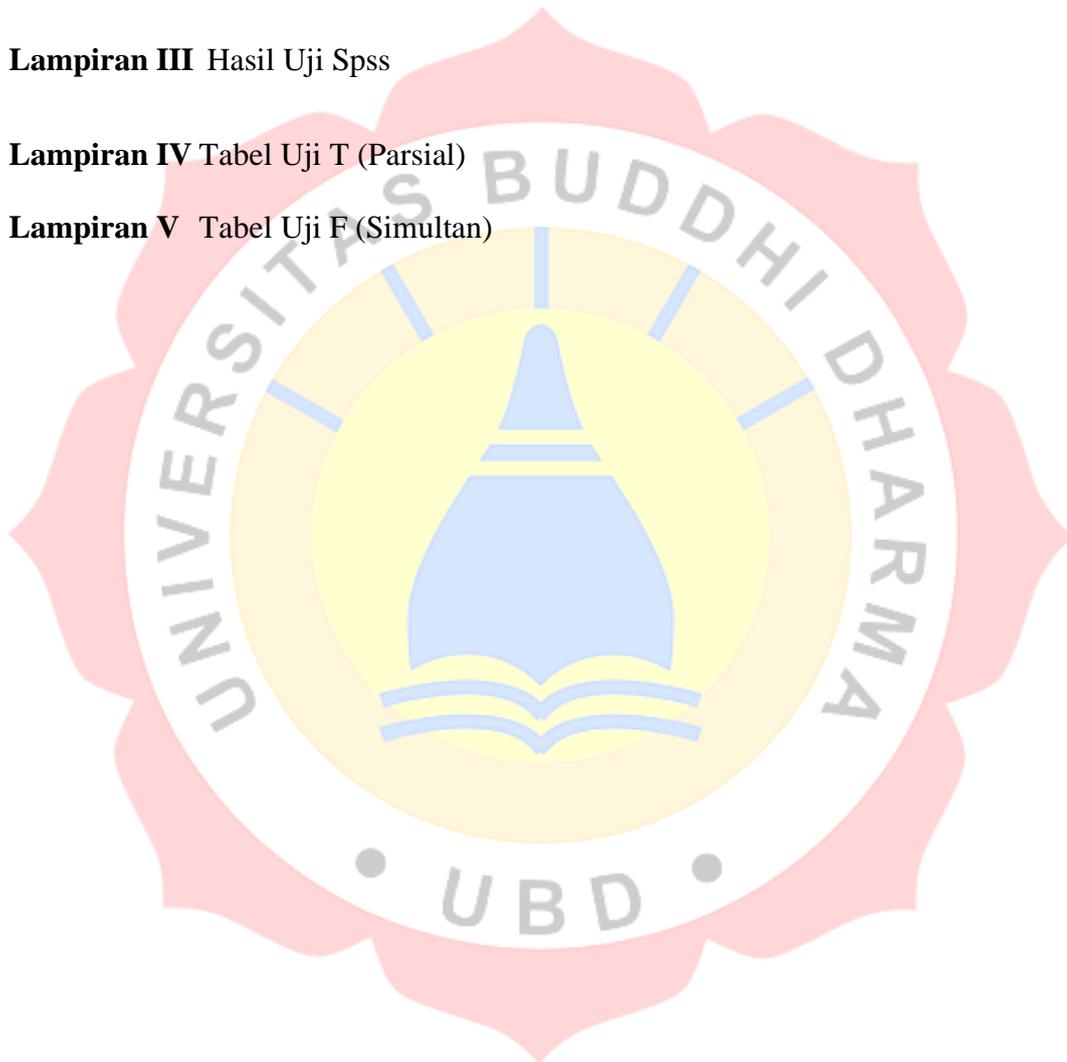
**Lampiran I** Identitas Kuisioner

**Lampiran II** Data Kuisioner

**Lampiran III** Hasil Uji Spss

**Lampiran IV** Tabel Uji T (Parsial)

**Lampiran V** Tabel Uji F (Simultan)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi telah membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menyederhanakan dan membuat banyak tugas yang sebelumnya sulit dan memakan waktu menjadi lebih fleksibel. Dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan banyaknya kejahatan siber dan bias menyebabkan gangguan kesehatan.

Sikap selektif diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, memastikan masyarakat tidak terjerumus ke dalam kondisi negatif. Misalnya, banyak bisnis yang dulunya beroperasi secara manual kini beralih ke platform *e-commerce*. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 50,7% pelaku usaha beralih ke *e-commerce* pada tahun 2021, meningkat 18 kali lipat dibandingkan tahun 2017 (*bps.go.id 2022*). Bain & Co melaporkan ekonomi digital Indonesia mencapai US\$ 70 juta pada tahun 2021, meningkat 49% dari US\$ 47 juta pada tahun 2020 (*highbridgeacademy.com*).

Indonesia memimpin Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi digital. Lonjakan ini didorong oleh kemajuan teknologi digital dan dampak pandemi Covid-19 yang mengharuskan peralihan ke aktivitas online. Meningkatnya pengguna platform *e-commerce* diperkirakan akan berdampak positif terhadap pendapatan negara.

Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan bagi otoritas pajak karena potensi pertumbuhan ekonomi bayangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan alat yang didukung oleh *Artificial Intelligence* (AI). Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sedang bersiap menerapkan strategi AI. Sistem AI dirancang untuk menunjukkan kecerdasan perilaku, menggunakan analisis ilmiah untuk memecahkan masalah kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan manusia.

Kecerdasan buatan berfungsi sebagai pelengkap manusia dengan mengurangi pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan atau prediksi pribadi. Sebuah studi pada tahun 2019 oleh Bullock membandingkan pengambilan keputusan manusia dengan AI dalam pemecahan masalah, menyoroti kemampuan AI untuk memberikan solusi yang lebih obyektif dan berbasis data (*bullock 2019*).

Selain penelitian Bullock pada tahun 2019, tantangan digitalisasi di bidang perpajakan, khususnya terkait hubungan, data, dan karakteristik sektor digital (*Hadzeiva 2016*). Untuk mengatasi tantangan tersebut, *Artificial Intelligence* (AI) dipandang sebagai solusi, membantu otoritas pajak dalam memantau kepatuhan wajib pajak. Mencatat bahwa AI dapat membantu menstandarisasi perilaku perpajakan, meminimalkan keputusan subjektif, dan meningkatkan upaya reformasi perpajakan (*Zhou 2019*).

Penggunaan AI diharapkan dapat meningkatkan rasio pajak, mengurangi penghindaran dan penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam administrasi perpajakan dapat meminimalkan human error dan mengurangi biaya administrasi.

Salah satu contohnya adalah prediksi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan parameter seperti riwayat pelaporan, pemotongan/pemungutan/penyetoran, dan riwayat pembayaran pajak dengan menggunakan metode *Artificial Neural Network* (ANN).

Seiring berkembangnya teknologi digital, banyak bisnis yang beralih ke platform *e-commerce*, yang meskipun bermanfaat, dapat berkontribusi terhadap ekonomi bayangan. Sebagai responnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah menerapkan AI dalam proses seperti pendaftaran *Nomor Pribadi Wajib Pajak* (NPWP) online dan penghitungan serta pelaporan pajak dan penghasilan (PPh) (DJP, 2024).

Di Indonesia, penggelapan pajak masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh otoritas pajak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti penerapan sistem perpajakan elektronik (*e-SPT dan e-faktur*), kasus penggelapan pajak tetap terjadi dengan berbagai modus yang semakin canggih. Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga merusak integritas sistem perpajakan dan mengganggu persaingan bisnis yang sehat.

Untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Di sinilah peran teknologi digital dalam pengawasan pajak menjadi sangat penting. Digitalisasi pengawasan pajak

mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor transaksi keuangan secara real-time, mengidentifikasi anomali, dan mendeteksi potensi penggelapan pajak sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh.

Penggelapan pajak merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan yang dapat menghambat penerimaan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Namun, praktik penggelapan pajak optimalisasi penerimaan negara, sehingga perlu upaya *preventif* untuk menanggulangnya.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar pada sistem perpajakan, termasuk pengawasan terhadap potensi pelanggaran. Pengawasan pajak digital, melalui integrasi data dan penggunaan platform digital seperti sistem *self-assessment*, dan sistem official assessment memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam sistem perpajakan. Meskipun demikian, praktik penggelapan pajak masih dapat terjadi karena adanya celah hukum dan keterbatasan sistem pengawasan.

Selain digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik menjadi solusi penting dalam mendeteksi indikasi *fraud*, termasuk penggelapan pajak. Akuntansi forensik memadukan keterampilan akuntansi, investigasi, dan hukum untuk menganalisis transaksi keuangan yang

mencurigakan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kecurangan dan mendukung proses penegakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam penggelapan pajak.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) menawarkan pendekatan yang lebih canggih dalam mendeteksi kecurangan pajak. AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, menemukan pola yang mencurigakan, serta memprediksi potensi *fraud* berdasarkan algoritma yang telah dirancang. Penerapan teknologi ini tidak hanya membantu otoritas pajak, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi perusahaan dalam memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Namun dalam hal ini, perusahaan masih menerapkan sistem teknologi melalui aplikasi sistem informasi akuntansi seperti *Accurate*, dan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) perusahaan yang mendukung.

Melalui kombinasi digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketiga elemen tersebut berpengaruh terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi otoritas perpajakan dan perusahaan dalam mengadopsi strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di era digital.

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademis, tetapi juga pada kontribusi praktisnya dalam mendukung kepatuhan perpajakan di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait upaya pencegahan penghindaran pajak pada perusahaan, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak perusahaan dan individu masih menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kewajiban untuk pembangunan negara. Tingkat literasi pajak yang rendah, sehingga banyak wajib pajak tidak memahami pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu.

2. Lemahnya Kesadaran Pajak di Kalangan Masyarakat

Masih ada anggapan bahwa pajak adalah beban, bukan kewajiban, sehingga banyak individu maupun bisnis yang mencari cara untuk menghindari pajak. Kurangnya edukasi pajak sejak dini, membuat masyarakat kurang memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

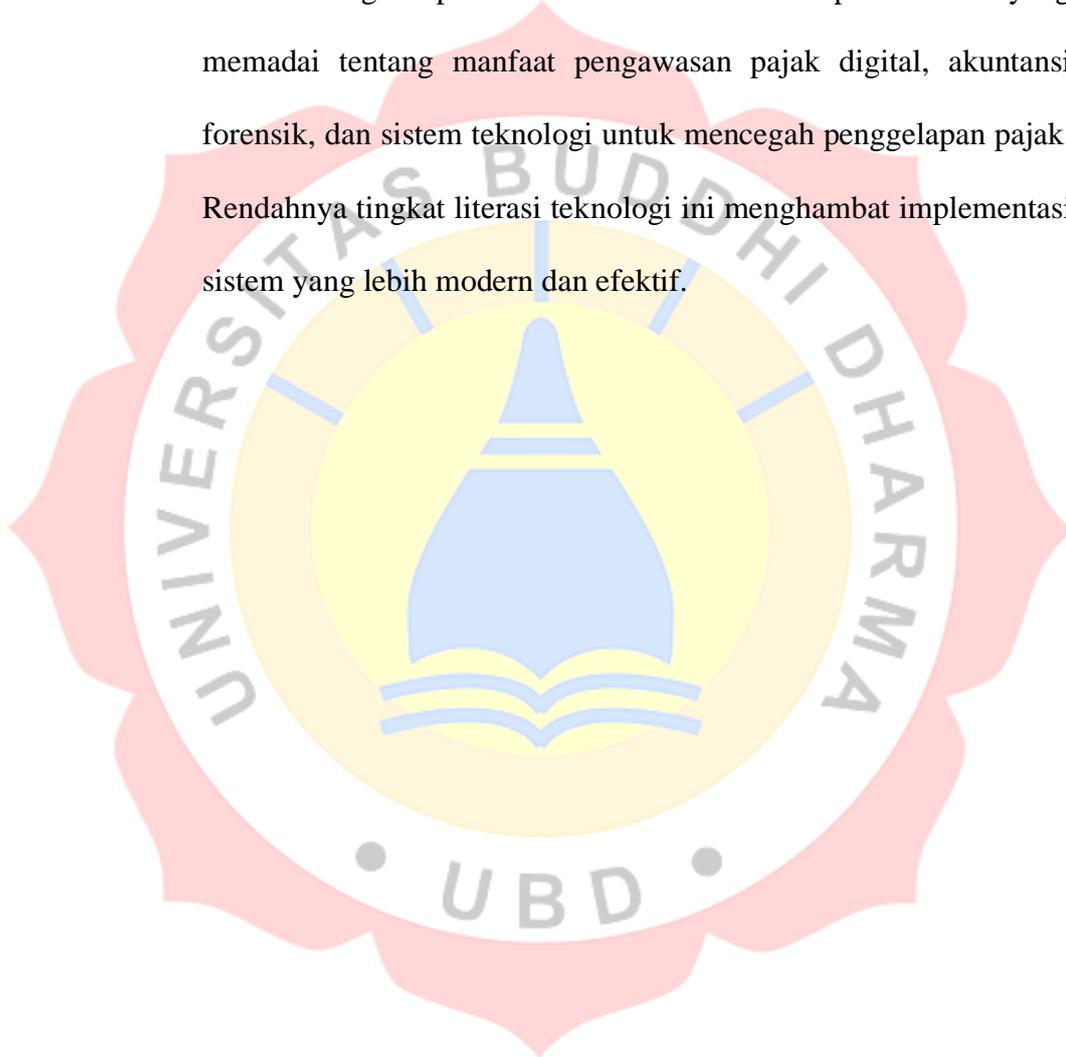
3. Masih maraknya penggelapan pajak oleh perusahaan

Penggelapan pajak masih menjadi masalah serius yang dilakukan oleh sebagian perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa

upaya pencegahan yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif untuk meminimalkan tindakan tersebut.

4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap teknologi digital dalam pencegahan fraud

Sebagian perusahaan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang manfaat pengawasan pajak digital, akuntansi forensik, dan sistem teknologi untuk mencegah penggelapan pajak. Rendahnya tingkat literasi teknologi ini menghambat implementasi sistem yang lebih modern dan efektif.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah digitalisasi pengawasan pajak berpengaruh terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan?
2. Apakah penerapan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan?
3. Apakah penggunaan sistem teknologi berpengaruh terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan?
4. Apakah pengawasan pajak digital, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pengawasan pajak terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan.
2. Untuk mengkaji pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan.
3. Untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan sistem teknologi terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan.
4. Untuk menilai pengaruh pengawasan pajak digital, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi secara simultan terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan.

Tujuan penelitian ini mencakup berbagai aspek mulai dari analisis dampak teknologi terhadap ekonomi digital, pengawasan perpajakan, hingga pengembangan strategi untuk mengatasi penggelapan pajak di masa depan dengan teknologi yang lebih canggih.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1.) Manfaat teoritis**

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, perpajakan, dan teknologi, khususnya terkait pencegahan penggelapan pajak melalui pengawasan pajak digital, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

- c. Memperkaya literatur akademik terkait integrasi teknologi modern dengan strategi akuntansi dan perpajakan untuk mencegah kecurangan.

## 2.) Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan

Memberikan wawasan kepada perusahaan tentang pentingnya penerapan akuntansi forensik, pengawasan pajak digital, dan sistem teknologi sebagai bagian dari strategi pencegahan penggelapan pajak.

Membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi dan metode investigasi yang lebih efektif.

Mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan integrasi sistem digital dalam proses manajemen pajak guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

- b. Bagi pemerintah atau otoritas pajak

Menjadi masukan bagi otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi pengawasan pajak dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Memberikan rekomendasi kebijakan dalam penerapan sistem teknologi modern, untuk mendukung pengelolaan data perpajakan yang lebih komprehensif.

- c. Bagi praktisi akuntansi dan konsultan pajak

Menyediakan panduan bagi praktisi dalam memahami dan menerapkan akuntansi forensik untuk mendeteksi kecurangan yang

berkaitan dengan pajak. Membantu konsultan pajak memberikan layanan yang lebih berbasis teknologi kepada klien dalam hal kepatuhan dan pencegahan fraud.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistem penulisan bab, yang disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur makalah.

##### **BAB II DASAR TEORI**

Bab ini memberikan latar belakang teoritis, termasuk tinjauan sebelumnya, kerangka kerja, dan hipotesis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi jenis penelitian, subjek, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, operasional variabel, dan teknik analisis data.

##### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi penyajian data penelitian, analisis hasil, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

##### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mencakup kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Teori Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan serta kejadian yang bersifat ekonomi suatu entitas tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal kepada pemangku kepentingan yang memerlukannya, baik internal maupun eksternal. Proses ini memungkinkan pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan, menilai kinerja, dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan serta kejadian yang bersifat ekonomi suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal. Proses ini memungkinkan pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan, menilai kinerja, dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat.

Menurut Suwardjono (2018:25) “suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan merancang pelaporan keuangan. Teori ini memberikan dasar logis dalam perumusan kebijakan akuntansi yang berlaku di suatu entitas, serta membantu mengidentifikasi isu-isu akuntansi untuk diteliti lebih lanjut”.

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac ( 2019:48) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: “seperangkat prinsip dan standar yang digunakan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan. Mereka menekankan bahwa teori akuntansi berfungsi untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangan secara konsisten, dan bertujuan agar laporan tersebut dapat dipahami oleh pemangku kepentingan.”

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018) memberikan definisi akuntansi secara sempit sebagai berikut: “untuk menjelaskan sistem akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip biaya, prinsip konsistensi, dan prinsip kewajaran.”

Menurut Mekari (2020) “menyediakan panduan dalam pencatatan tetapi juga dalam penyusunan kebijakan yang mendasari keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh perusahaan, dengan penekanan pada relevansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.”

Dari definisi diatas bahwa akuntansi adalah teori akuntansi dapat disimpulkan sebagai suatu kerangka konseptual digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan merancang pelaporan keuangan, yang berfungsi sebagai panduan untuk menyiapkan laporan keuangan yang konsisten, relevan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan., serta mendasari keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh perusahaan.

Selain itu, teori akuntansi juga membantu dalam menciptakan kebijakan akuntansi yang logis dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi, seperti prinsip biaya, konsistensi, dan kewajaran, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, teori akuntansi tidak hanya berperan dalam pencatatan transaksi, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan Akuntansi, sering

disebut sebagai “bahasa bisnis”, disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan peraturan yang ada karena memberikan wawasan yang jelas tentang keadaan keuangan dan hasil operasional perusahaan. Proses akuntansi tidak hanya mencakup pencatatan transaksi, tetapi juga melibatkan analisis dan interpretasi data keuangan untuk mendukung manajemen dalam perencanaan strategis dan pengendalian.

## **2. Perpajakan**

### **a. Pengertian pajak**

Serangkaian aturan, kebijakan, dan mekanisme yang mengatur proses pengenaan, pemungutan, pembayaran, dan pengelolaan pajak oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha sebagai bagian dari kontribusi wajib mereka untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2018:45) menyatakan bahwa, “Pajak adalah Pajak merupakan iuran wajib kepada negara untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa imbalan jasa yang langsung dapat dilihat”.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2018:204) mendefinisikan “Pajak sebagai kontribusi yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sifatnya memaksa”.

Menurut Siti Resmi (2019) menjelaskan, “Pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa menerima balasan langsung”.

Menurut Rochmat Soemitro (2019), pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum”.

Dari definisi diatas bahwa pajak merupakan iuran wajib dan wajib dari masyarakat yang dialokasikan untuk kebutuhan negara, dengan tanpa menerima balasan langsung atau imbalan jasa secara spesifik. Berbagai ahli sepakat bahwa pajak merupakan iuran yang diatur dalam undang-undang dan memiliki fungsi penting untuk membiayai kepentingan umum. Teori ini menunjukkan sifat memaksa pajak yang menjadi kewajiban setiap warga negara.

Perpajakan merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.

Perpajakan adalah alat fiskal pemerintah untuk:

1. Mengumpulkan pendapatan negara (fungsi *budgetair*).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Mengatur aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (fungsi regulasi).

Pajak digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial, misalnya memberikan insentif pajak bagi investasi atau

mengenakan pajak cukai untuk mengurangi konsumsi barang tertentu.

3. Menjaga stabilitas ekonomi (fungsi stabilitas).

Pajak membantu menstabilkan perekonomian, misalnya dengan menyesuaikan tarif pajak selama inflasi atau resesi.

4. Menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan.

Pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan pendapatan kepada kelompok yang membutuhkan melalui program pemerintah.

b. Unsur-Unsur Perpajakan

1. Iuran Wajib: Pajak merupakan kewajiban wajib bagi orang pribadi atau badan usaha.
2. Bersifat Memaksa: Pembayaran pajak diwajibkan oleh undang-undang, sehingga dapat dikenai sanksi jika tidak dipenuhi.
3. Tanpa Imbalan Langsung: Wajib pajak tidak menerima manfaat langsung atas pembayaran pajaknya, tetapi hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum.
4. Berdasarkan Peraturan: Semua ketentuan perpajakan harus diatur oleh Undang-Undang untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

### 3. Digitalisasi Pengawasan Pajak

#### a. Umum

Menurut Sarwoto (2019:118) menyebutkan beberapa karakteristik pengawasan yang efektif dalam sistem pajak, antara lain adanya keakuratan data yang digunakan untuk pengawasan, tepat waktu dalam pengumpulan dan analisis data, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan pengawasan dengan kondisi yang berubah.

Menurut Sule dan Saefullah (2020:109) berpendapat bahwa tujuan utama dari pengawasan pajak adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah penyimpangan atau kesalahan dalam pelaporan pajak, dengan fokus pada pengawasan yang bersifat mendidik dan membimbing.

Menurut Daulay (2018) mendefinisikan pengawasan sebagai upaya fokus pada penetapan standar, merancang sistem umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan pencapaian tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut Rachmawati (2020) mengungkapkan bahwa pengawasan dalam konteks perpajakan dilakukan dengan memastikan bahwa proses pelaporan upaya memastikan pembayaran pajak mengikuti peraturan dengan peran petugas pajak yang krusial sebagai penghubung antara pemerintah dan wajib pajak.

Kesimpulan dari definisi pengawasan pajak adalah bahwa pengawasan pajak berfokus pada memastikan kepatuhan wajib pajak dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pengawasan ini membutuhkan keakuratan data, pengumpulan informasi tepat waktu, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Selain itu, pengawasan pajak tidak hanya bersifat korektif tetapi juga mendidik dan membimbing wajib pajak agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang efektif melibatkan sistem yang dapat mengevaluasi kegiatan aktual dibandingkan dengan standar, dan tindakan perbaikan diambil untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan.

b. Dasar hukum

- 1) Tarif Efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Pegawai: Mulai 1 Januari 2024, perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 2) Perlakuan Pajak Penghasilan atas Devisa Hasil Ekspor: Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 mengatur perlakuan PPh atas penghasilan dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam pada instrumen moneter

dan/atau keuangan tertentu di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Hak dan Kewajiban Perpajakan;

- 3) Perubahan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak oleh Instansi Pemerintah: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 mengubah ketentuan terkait bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah.

#### **4. Akuntansi Forensik**

##### **a. Pengertian akuntansi forensik**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data.

Akuntansi forensik merujuk pada penggunaan teknik audit dan investigasi dalam bidang akuntansi untuk mendeteksi dan menganalisis kecurangan keuangan, serta memberikan dukungan dalam penyelesaian sengketa hukum. Dalam definisi yang lebih rinci, akuntansi forensik mencakup kegiatan pencatatan, analisis, klasifikasi, dan konfirmasi data keuangan yang berhubungan dengan masalah hukum, baik untuk penyelesaian sengketa di masa lalu maupun yang akan datang Arboleda dan Torres(2018:39)

Menurut Dhar dan Sarkar (2019:70) Akuntansi forensik didefinisikan sebagai penerapan prinsip dan teknik akuntansi pada permasalahan hukum, khususnya dalam pelaporan penipuan, dimana temuannya diperlakukan sebagai bukti hukum.

Menurut Skousen dan Wright (2018) mengungkapkan bahwa akuntansi forensik adalah disiplin yang berhubungan dengan deteksi dan investigasi kecurangan keuangan serta analisis laporan keuangan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan.

Menurut Bambang arianto (2020) mengatakan bahwa “Akuntansi forensik, juga disebut sebagai audit forensik, adalah praktik khusus yang bertujuan untuk mengatasi aktivitas penipuan dalam akuntansi. Artikel ini menguraikan beberapa indikator yang berkontribusi terhadap kecurangan dalam korupsi politik, antara lain faktor-faktor seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi”.

Kesimpulan dari definisi akuntansi forensik diatas adalah bahwa akuntansi forensik menggabungkan keahlian akuntansi dan audit dengan hukum untuk mendeteksi dan menyelidiki kecurangan keuangan. Akuntansi forensik bertujuan untuk menghasilkan bukti yang dapat dipertanggung jawab kan dalam persidangan dan digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum. Hal ini mencakup pelaporan yang digunakan sebagai bukti hukum dalam mengungkap penipuan, serta analisis laporan keuangan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Pada dasarnya, akuntansi forensik berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hukum baik di luar maupun

dalam pengadilan dengan memastikan keakuratan dan transparansi dalam laporan keuangan.

**b. Tugas akuntan forensik**

Akuntan forensik dapat menjadi saksi ahli dalam kasus keuangan, sehingga membutuhkan pengetahuan tentang penanganan bukti untuk menjaga kredibilitas di pengadilan.

Beberapa fungsi utama akuntan forensik meliputi:

1) Investigasi aktivitas *fraud*

Akuntan forensik didatangkan setiap kali ada kecurigaan adanya penipuan dalam suatu organisasi.

2) Menentukan apakah adanya *fraud* benar-benar terjadi

Akuntan forensik dipanggil untuk memverifikasi apakah penipuan telah terjadi, terutama ketika alarm palsu muncul.

3) Untuk mengidentifikasi pelaku *fraud*

Akuntan forensik menggunakan keahliannya untuk mengidentifikasi pelaku penipuan.

4) Mengumpulkan bukti keuangan

Tanpa bukti, mustahil menghubungkan penipu dengan kejahatan tersebut. Akuntan forensik memberikan bukti keuangan yang diperlukan dalam jumlah yang tepat.

## 5. Penggunaan Sistem Teknologi

### a. Apa itu sistem teknologi

Sistem teknologi adalah kombinasi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan, dan data yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan komunikasi dalam organisasi.

Menurut Turban *et al.* (2019) Teknologi informasi menjadi pilar utama transformasi digital dalam perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan analitik berbasis data.

Gary J. Anglin (2020) mengartikan teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan manusia, dengan kemajuan pesat yang memberikan manfaat pada berbagai aspek kehidupan.”

Menurut Laudon (2020:209) “Sistem teknologi informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi.”

Menurut Davenport dan Harris (2020:105) Penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan telah mengubah cara perusahaan membuat keputusan strategis, menawarkan wawasan berbasis data yang mendalam.

Menurut Maryono. (2019) mengatakan bahwa “Teknologi adalah penerapan atau pengembangan alat, perlengkapan, atau sistem yang digunakan manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.”

Kesimpulan dari definisi diatas bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai penggerak

inovasi dan efisiensi, membantu perusahaan menghadapi tantangan bisnis modern dan meraih keunggulan kompetitif.

## **b. Komponen sistem teknologi**

Sistem teknologi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Perangkat keras (*Hardware*): Komputer, server, dan perangkat lain yang digunakan untuk menjalankan sistem. Perangkat keras merupakan fondasi fisik yang mendukung operasional teknologi di perusahaan.
2. Perangkat lunak (*Software*): Aplikasi dan program yang mendukung fungsi bisnis. Perangkat lunak mencakup berbagai jenis, mulai dari sistem operasi hingga aplikasi khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan.
3. Jaringan (*Networking*): Koneksi antara perangkat untuk memungkinkan komunikasi data. Jaringan yang kuat memastikan kelancaran pertukaran informasi di seluruh bagian organisasi.
4. Data: Informasi yang dikelola dan digunakan oleh sistem untuk mendukung operasi perusahaan. Data adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan, yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis.

Komponen-komponen ini saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif. Integrasi yang baik antara komponen-komponen ini akan menentukan keberhasilan implementasi teknologi di perusahaan.

**c. Manfaat penggunaan sistem teknologi dalam perusahaan**

Penggunaan sistem teknologi dalam perusahaan memiliki banyak manfaat, antara lain:

1. Efisiensi operasional: Mengotomatisasi proses bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya. Dengan teknologi, perusahaan dapat mengeliminasi aktivitas manual yang memakan waktu, sehingga meningkatkan produktivitas.
2. Akurasi data: Mengurangi kesalahan manusia melalui pengolahan data otomatis. Teknologi memungkinkan pengelolaan data yang akurat dan real-time sangat penting untuk pengambilan keputusan.
3. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Memberikan data yang relevan dan real-time kepada manajemen. Teknologi memungkinkan analisis data yang lebih mendalam untuk mendukung strategi bisnis.
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan: Sistem teknologi memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan personal, yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.
5. Keunggulan kompetitif: Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar global. Teknologi dapat membantu

perusahaan untuk menciptakan inovasi produk dan layanan yang lebih baik.

#### **d. Tantangan dalam Implementasi Sistem Teknologi**

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi sistem teknologi dalam perusahaan tidak tanpa tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Biaya Implementasi:** Investasi awal yang tinggi untuk infrastruktur teknologi.
2. **Keamanan Data:** Ancaman keamanan seperti peretasan dan kebocoran data. Perusahaan harus mengadopsi langkah-langkah keamanan yang efektif untuk melindungi data mereka.
3. **Resistensi terhadap Perubahan:** Karyawan yang enggan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pelatihan dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi hambatan ini.
4. **Ketersediaan Sumber Daya:** Perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan untuk memenuhi permintaan pekerja terampil di bidang teknologi.

#### **e. Peran Teknologi dalam Fungsi Bisnis**

Teknologi memainkan peran penting dalam berbagai fungsi bisnis, seperti:

1. **Manajemen Keuangan:** Sistem akuntansi berbasis teknologi memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih efisien dan

akurat. Teknologi juga mendukung analisis keuangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis.

2. Sumber Daya Manusia: Pengelolaan data karyawan, rekrutmen, dan pelatihan secara digital. Teknologi membantu perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia dengan lebih efektif.
3. Operasi: Otomasi produksi dan manajemen rantai pasok menggunakan teknologi canggih. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.
4. Pemasaran: Penggunaan analitik data untuk memahami perilaku pelanggan dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Teknologi juga mendukung kampanye pemasaran digital yang lebih terukur.

## **6. Pencegahan Penggelapan Pajak**

### **a. Pengertian *tax fraud***

Penipuan pajak adalah tindakan ilegal untuk menghindari atau mengurangi pajak yang terhutang oleh individu atau perusahaan. Pelaku sering memanipulasi laporan pendapatan, pengeluaran, atau aset untuk menurunkan kewajiban pajaknya atau menghindari pembayaran pajak sama sekali.

Menurut Yulia & Muanifah (2021) “pencegahan penggelapan pajak didefinisikan sebagai serangkaian langkah pengawasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko penghindaran pajak melalui penerapan

teknologi digital, audit risiko, dan peningkatan transparansi wajib pajak”.

“Perbuatan yang melanggar hukum berupa penggunaan cara-cara yang tidak sah, seperti wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan dengan memalsukan dokumen atau memberikan data yang tidak lengkap dan tidak benar Dewanta (2019)”.

Menurut Irwan Lubis (2018:16) bahwa “Penghindaran pajak adalah manipulasi pajak untuk menghindari pembayaran utangnya atau mengurangi dasar pengenaan pajak dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut M. Farouq (2018:165) Dijelaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan menghilangkan atau mengurangi kewajiban perpajakan secara melawan hukum.

Dari kesimpulan diatas bahwa pencegahan ini melibatkan serangkaian langkah pengawasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Pendekatan yang digunakan meliputi penerapan teknologi digital, seperti audit risiko, kecerdasan buatan (AI), dan peningkatan transparansi wajib pajak.

Keterangan yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak tidak benar atau sengaja dipalsukan. Hal ini dianggap

sebagai pelanggaran serius di banyak negara, termasuk Indonesia, dan dapat mengakibatkan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga tuntutan pidana.

Ada beberapa jenis penipuan pajak, antara lain:

1. Penghindaran Pajak

Mengurangi kewajiban pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan pendapatan, mengklaim pemotongan ilegal, atau menggunakan dokumen palsu.

2. Faktur Fiktif atau Dokumen Palsu

Menggunakan faktur palsu atau dokumen yang dimanipulasi untuk menggelembungkan biaya operasional dan mengurangi kewajiban pajak.

3. Penghindaran Pajak Melalui Penetapan Harga Transfer

Memanipulasi harga transaksi antara perusahaan terkait untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah atau tanpa pajak.

4. Kapitalisasi Tipis

Menambah utang perusahaan untuk menggelembungkan beban bunga sehingga mengurangi beban pajak, meskipun memiliki kemampuan finansial yang kuat.

### **b. Peraturan yang berkaitan dengan praktik tax fraud**

Pemerintah mengatasi penyelewengan pajak melalui berbagai peraturan sebagai kerangka hukum tindakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Terkait Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Pemerintah.

### **c. Cara mencegah tax fraud**

Pemerintah mencegah penipuan pajak melalui:

1. Integrasi NIK dengan NPWP, efektif tahun 2024.
2. Memperketat pengawasan dengan Aturan Anti Penghindaran Khusus (SAAR).
3. Pengawasan ketat terhadap transaksi penghindaran pajak.
4. Membutuhkan pelaporan pendapatan dan pengeluaran yang jujur.

5. Menggunakan sistem digital seperti e-filing dan e-faktur untuk meningkatkan pengawasan.

## B. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

Tabel II.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sukarmanto, A. & Puspitasari, D. (2021)	Pengaruh Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia	Sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional, karena memudahkan pelaporan dan mencegah manipulasi data keuangan.
2.	Tuanakotta, T. M. (2019)	Akuntansi Forensik dan Investigasi Keuangan: Pendekatan Terhadap Pencegahan Fraud dan Korupsi di Perusahaan Publik	Akuntansi forensik efektif dalam mendeteksi penipuan dan anomali pada laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI, termasuk dalam hal perpajakan.
3.	Utami, A. & Rahayu, S. (2020)	Peran Teknologi Informasi dan AI dalam Mendeteksi Fraud pada Transaksi Perusahaan Multinasional	Penerapan AI mampu mendeteksi fraud secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi, yang membantu dalam mencegah penggelapan pajak secara lebih efektif di perusahaan multinasional.
4.	Wahyuni, L. & Mahardika, R. (2022)	Pengaruh Akuntansi Forensik dan Pengawasan Pajak Digital Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak di Indonesia	Penggabungan akuntansi forensik dan pengawasan pajak digital menghasilkan efek yang kuat dalam mencegah penggelapan pajak pada perusahaan skala besar yang terdaftar di BEI.
5.	Firmansyah, A. & Siregar, E. (2019)	Pengaruh Teknologi Blockchain dan AI	Blockchain dan AI memberikan transparansi yang lebih besar dalam transaksi lintas batas, mengurangi

		Terhadap Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Multinasional	peluang perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak.
6.	Rahmawati, E. & Putra, H. (2020)	Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi dan Akuntansi Forensik dalam Mengurangi Penggelapan Pajak pada Perusahaan Besar di Indonesia	Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan teknologi informasi modern dan menerapkan akuntansi forensik lebih mampu mendeteksi dan mencegah penggelapan pajak, terutama melalui audit internal yang lebih baik
7.	Hartono, B. & Nugraha, S. (2021)	Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia	Studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam penerapan e-filing dan e-invoicing, secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak perusahaan, termasuk multinasional, dengan mengurangi peluang penggelapan pajak melalui pelaporan keuangan yang lebih akurat dan transparan
8.	Mulyadi, S. & Kartika, D. (2019)	Peran Artificial Intelligence dalam Mencegah Penipuan dan Penggelapan Pajak di Perusahaan Multinasional	AI digunakan secara luas dalam mendeteksi pola-pola penipuan yang sulit dideteksi oleh sistem manual, terutama pada transaksi yang kompleks dan lintas negara. Ini membantu mencegah praktik penggelapan pajak di perusahaan besar.
9.	Metta Yohana (2023)	Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Self Assessment, Digitalisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa/i Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis Angkatan	Untuk menguji tarif pajak progresif, self assessment, digitalisasi administrasi, dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak.

		Tahun 2019 – 2021)	
10.	Sutrisno, T. & Widiastuti, F. (2022)	Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak pada Perusahaan Publik di Indonesia	Digitalisasi pengawasan pajak telah meningkatkan akuntabilitas perusahaan publik dan multinasional dalam menyusun laporan pajak mereka, mengurangi peluang terjadinya penggelapan pajak melalui sistem pelaporan yang lebih transparan.
11.	Firdaus, A. & Haryanto, S. (2020)	Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Penggelapan Pajak di Perusahaan Multinasional	Studi ini menemukan bahwa akuntansi forensik yang dikombinasikan dengan audit investigatif dapat secara efektif mengungkap manipulasi data keuangan yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan yang menerapkan pendekatan ini mampu mengurangi potensi penggelapan pajak.
12.	Nadia Rinjani Priyatna (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada badan usaha mega kecil
13	Hidayat, R. & Yuniar, F. (2022)	Efektivitas Penggunaan AI dalam Pengawasan Pajak pada Perusahaan Besar di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AI dalam sistem pengawasan pajak meningkatkan akurasi dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Perusahaan besar yang menggunakan AI untuk memonitor laporan keuangan mereka mampu mengurangi risiko penggelapan pajak.
14.	Widjaja, M. & Pratama, E. (2023)	Pengaruh Digitalisasi Pelaporan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Perusahaan Multinasional di Indonesia.	Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi pelaporan pajak melalui sistem e-filing dan e-invoicing meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan multinasional, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak.

15.	Setiawan, B. & Wulandari, S. (2019)	Peran Akuntansi Forensik dalam Mengungkap Praktik Penggelapan Pajak pada Perusahaan di Sektor Jasa	Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik memainkan peran penting dalam mengungkap skema penggelapan pajak di perusahaan sektor jasa, yang sering kali menggunakan metode manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar
-----	-------------------------------------	--	---

Sumber : diolah sendiri (2024)

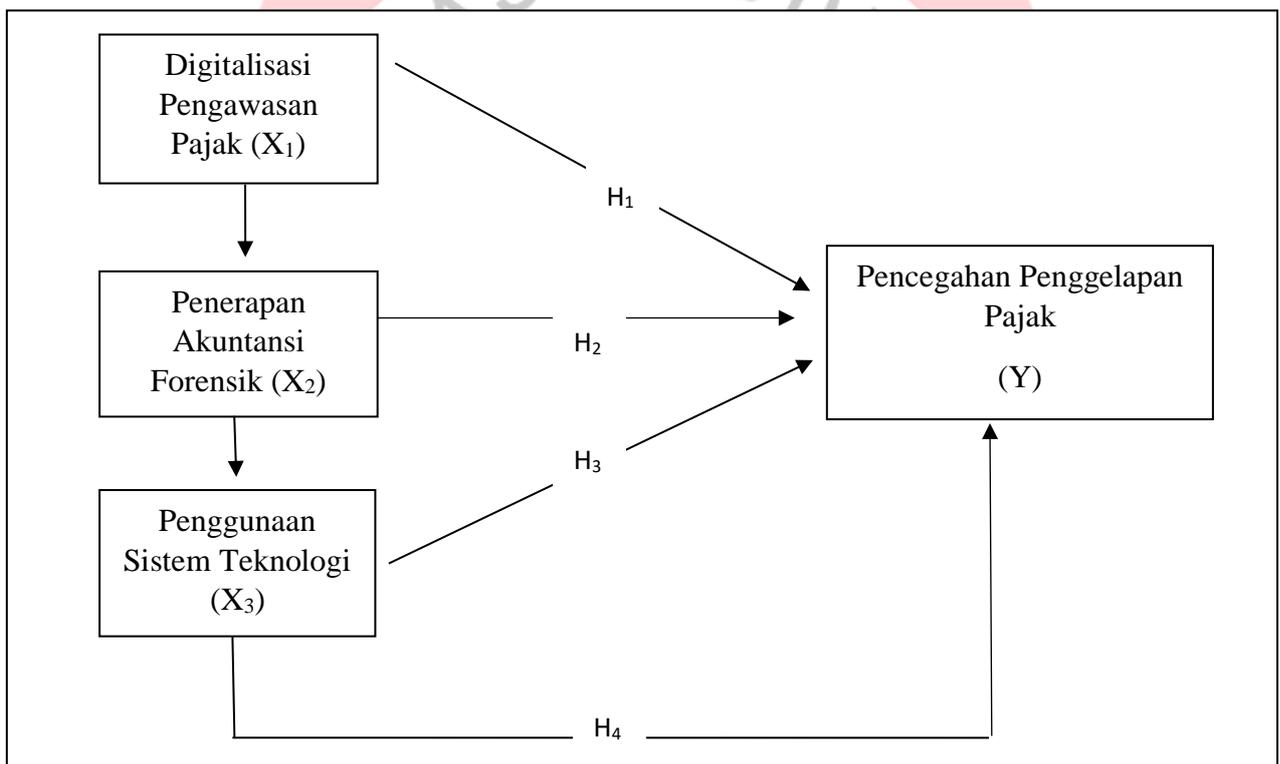


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini dikembangkan berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar:

**Gambar II.1**

#### **Kerangka Pemikiran Teoritis**



Sumber: diolah sendiri (2024)

Keterangan :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencegahan penggelapan pajak (Y).
2. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain Digitalisasi pengawasan pajak ( $X_1$ ), Penerapan akuntansi forensik ( $X_2$ ), Penggunaan sistem teknologi ( $X_3$ ).
3.  $H_1$  Variabel  $X_1$  terhadap variabel dependen.
4.  $H_2$  Variabel  $X_2$  terhadap variabel dependen.
5.  $H_3$  Variabel  $X_3$  terhadap variabel dependen.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, berdasarkan asumsi, yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Hipotesis penelitian diuraikan sebagai berikut:

( $H_1$ ): Digitalisasi pengawasan pajak berpengaruh positif terhadap pencegahan penggelapan pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk.

( $H_2$ ): Penerapan akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap pencegahan penggelapan pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk.

( $H_3$ ): Penggunaan sistem teknologi untuk mendeteksi penipuan berpengaruh positif terhadap pencegahan penggelapan pajak PT Armidian Karyatama, Tbk.

(H<sub>4</sub>): Digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan penggelapan pajak pada PT Armidian Karyatama, Tbk.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan *hypothesis testing* untuk menguji pengaruh digitalisasi pengawasan pajak, penerapan akuntansi forensik, dan penggunaan sistem teknologi terhadap pencegahan penggelapan pajak pada perusahaan. Desain penelitian ini bersifat kausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Pendekatan kuantitatif ini dapat dianalisis menggunakan alat statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

Menurut Yohana dan Wibowo (2019), “Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dengan melibatkan responden secara langsung melalui wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sampel yang dipilih.”

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

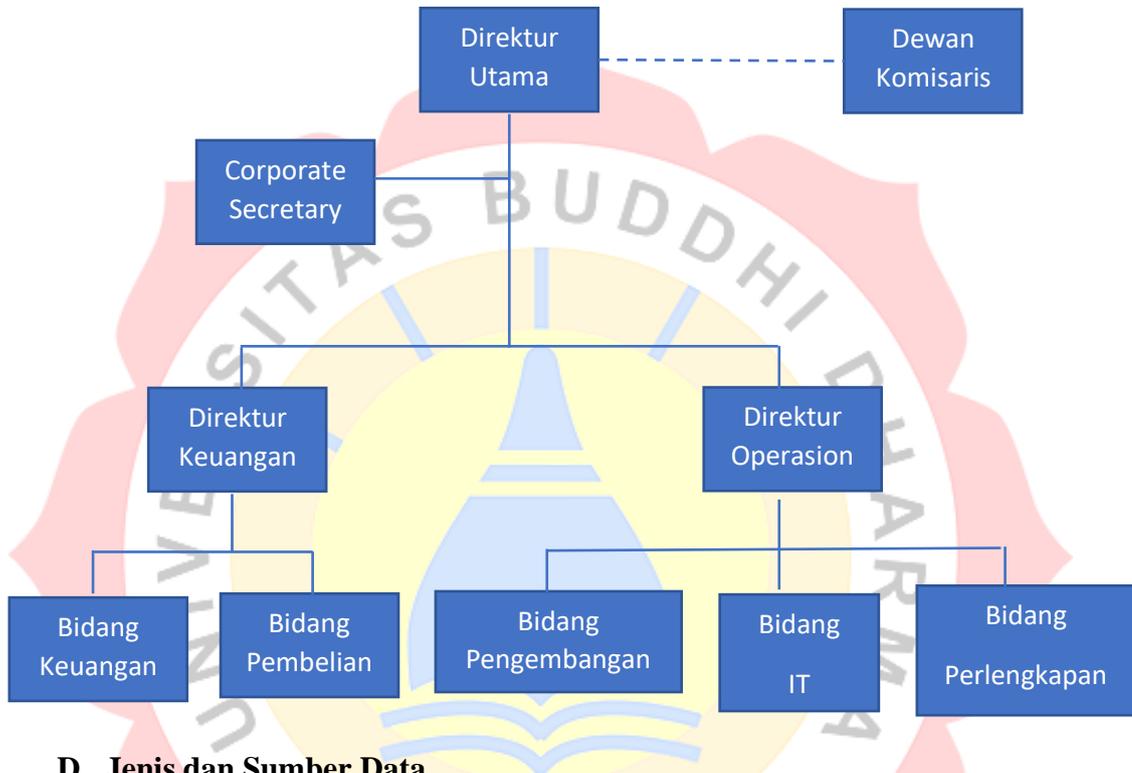
Objek penelitian ini adalah PT Armidian Karyatama, Tbk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan *real estate* di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pengembangan properti komersial dan residensial serta menyediakan layanan manajemen properti. PT Armidian Karyatama, Tbk didirikan pada tahun 1994 dalam pengembangan properti komersial dan residensial. Seiring berjalannya waktu, perusahaan memperluas portofolionya dengan mengembangkan proyek-proyek property yang lain.

### C. Struktur Perusahaan

Gambar III.1

#### Struktur Perusahaan

##### PT Armidian Karyatama, Tbk



### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data Penelitian

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Jenis data ini bersifat kuantitatif, berupa angka atau skor hasil dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan pada kuesioner.

Data primer mencerminkan persepsi, pengalaman, atau pandangan responden terhadap digitalisasi pengawasan pajak, penerapan

akuntansi forensik, penggunaan sistem teknologi, dan pencegahan penggelapan pajak.

## 2. Sumber data primer

Responden yang menjadi objek penelitian, yaitu manajer pajak, staf keuangan, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan, akuntansi forensik, atau penerapan sistem teknologi terkait di perusahaan.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di Indonesia.

Menurut Sugiyono (Nurdin Ismail & Hartati Sri) mengatakan bahwa: "Populasi mengacu pada sekelompok objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari, dari mana peneliti menarik kesimpulan."

Penulis memilih perusahaan berdasarkan kualitas tertentu untuk memastikan hasil yang dapat diandalkan dan kesimpulan yang jelas.

### 2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling*, yaitu jenis pengambilan sampel *non-probabilitas* yang melibatkan pengambilan sampel dari bagian populasi yang terdekat.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyebarkan pertanyaan kepada responden.

Kuesioner dirancang menggunakan *skala Likert* untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian, yaitu:

- a. Digitalisasi Pengawasan Pajak (X1)
- b. Akuntansi Forensik (X2)
- c. Penggunaan Sistem Teknologi (X3)
- d. Pencegahan Penggelapan Pajak (Y)

Kuesioner dikirimkan secara langsung atau melalui media elektronik (email atau *platform survei online*) untuk menjangkau responden dengan lebih mudah dan cepat.

## 2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan. Sumber data mencakup laporan tahunan perusahaan, jurnal akademik, serta publikasi resmi lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendukung teori yang telah dikaji, memberikan konteks pada hasil penelitian, serta memastikan hasil yang diperoleh memiliki dasar yang kuat.

- a. Memperkuat validitas penelitian dengan data pendukung.

- b. Memberikan informasi historis atau tren terkait topik penelitian.

### G. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengukur variabel penelitian, berikut adalah definisi operasional dari variabel independen dan dependen:

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	X1: Digitalisasi Pengawasan Pajak	Penggunaan teknologi digital dalam proses pengawasan dan administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integritas sistem digital.</li> <li>- Pemantauan real-time.</li> <li>- Kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>	Skala likert
2.	X2: Penerapan Akuntansi Forensik	Penerapan metode akuntansi investigatif untuk mendeteksi, menganalisis dan mengungkapkan indikasi penghindaran pajak dalam laporan keuangan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman terkait akuntansi forensik.</li> <li>- Frekuensi investigasi fraud.</li> <li>- Penggunaan metode akuntansi forensik dalam audit pajak.</li> </ul>	Skala likert
3.	X3: Penggunaan Sistem Teknologi	Penggunaan teknologi seperti artificial intelligence(AI), Big Data, dan sistem otomatisasi dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas sistem teknologi dalam mendeteksi anomali.</li> <li>- Penerapan Sistem</li> </ul>	Skala likert

		mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan terkait penghindaran pajak.	teknologi dalam investigasi perusahaan	
4.	Y: Pencegahan Penggelapan Pajak	Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dan otoritas pajak untuk mencegah tindakan penghindaran pajak melalui regulasi, teknologi, dan pengawasan yang lebih ketat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepatuhan pajak.</li> <li>- Penurunan risiko fraud pajak.</li> <li>- Kebijakan internal perusahaan.</li> </ul>	Skala likert

Sumber: diolah sendiri (2024)

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Uji validitas memastikan bahwa kuesioner secara akurat mengukur variabel yang dimaksud, dengan pertanyaan yang valid mencerminkan informasi yang ditargetkan (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan korelasi Pearson untuk menghitung korelasi antar nilai pertanyaan. Jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 (sig. <

0,05), maka data tersebut valid. Jika tingkat signifikansinya di atas 0,05 (sig. > 0,05), maka data tersebut tidak valid (Ghozali, 2018).

#### **b. Uji Reliabilitas**

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai diatas 0,70 menunjukkan reliabilitas. Reliabilitas diperlukan untuk pengujian validitas, namun instrumen yang andal belum tentu valid, begitu pula sebaliknya.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas memeriksa apakah nilai sisa terdistribusi normal. Model regresi yang baik harus memiliki data yang terdistribusi normal atau hampir normal. Dua metode dapat digunakan untuk tes ini:

- 1) Analisis grafis menggunakan Normal Probability Plot untuk membandingkan data observasi dengan distribusi normal, dimana data yang mengikuti garis diagonal menunjukkan normalitas (Ghozali, 2018).
- 2) Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memeriksa normalitas dengan membandingkan data observasi dengan distribusi teoritis. Jika  $Asymp. Tanda. > 0,05$  maka datanya normal (Ghozali, 2018).

## b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memeriksa korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat dideteksi dengan menggunakan nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF), dimana  $VIF = 1 / \text{Tolerance}$ . Jika  $VIF \leq 10$  dan  $\text{Tolerance} \geq 0,10$  berarti tidak terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2018).

## 3. Analisis Data Model Statistik

### a. Analisis regresi linear berganda

Analisis Regresi Linier mengeksplorasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen untuk memprediksi perubahan variabel dependen. Ini menggunakan data interval atau rasio:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sumber: Sugiyono (2019:292)

#### Keterangan

Y : Pencegahan penggelapan pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 X_1$  : Koefisien regresi  $X_1$  (Pengawasan pajak digital)

$\beta_2 X_2$  : Koefisien regresi  $X_2$  (Penerapan kuantansi forensik)

$\beta_3 X_3$  : Koefisien regresi  $X_3$  (Penggunaan teknologi AI)

e : *Error*

#### 4. Uji statistik

##### a. Uji T (Uji parsial)

Uji parsial mengevaluasi signifikansi korelasi R dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan pengujian hipotesis dimana

$H_0 = 0$  (tidak signifikan) dan  $H_1 \neq 0$  (signifikan):

$$t = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2019:248)

Keterangan:

- t : Pengujian hipotesis
- r : Koefisien korelasi
- r : Koefisien determinasi
- n : Jumlah sampel

Tolak ukur untuk menguji hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai thitung nilai teabet maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- b) Jika nilai thitung nilai tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### b. Uji F (Uji secara Simultan)

Uji F menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen berikut:

$$F_n = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)(n - k - 1)}$$

Sumber: Sugiyono (2019:257)

Keterangan:

$F_n$ :  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$

$R^2$ : Koefisien korelasi berganda

$K$  : Jumlah variabel independen

$N$ : Jumlah anggota sampel

Setelah menghitung nilai  $F_{hitung}$ , bandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 (5%).

Kriterianya adalah:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (variabel independen signifikan terhadap variabel dependen).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  (variabel independen tidak signifikan dengan variabel dependen)

### c. Uji koefisien determinasi R<sup>2</sup>

Koefisien determinasi menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dengan Nagelkerke's R Square serupa dengan Sugiyono's R Square pada regresi linier (2018).

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono (2018:300)

Keterangan:

Kd : Koefisien Determinasi

R : Koefisien Korelasi

### I. Uji Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Digitalisasi Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan penggelapan pajak.

H2: Penerapan akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan penggelapan pajak.

H3: Penggunaan sistem teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan penggelapan pajak.

### J. Alat Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS untuk analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.